

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kemajuan pendidikan Indonesia dari tahun ke tahun telah menampakkan hasilnya. Meskipun demikian, bangsa Indonesia masih tetap dihadapkan pada berbagai persoalan besar yang sangat klasik. Azra (2002: xv) mengidentifikasi persoalan pendidikan di Indonesia yaitu :

Pertama, kesempatan mendapatkan pendidikan masih tetap terbatas (*limited capacity*). *Kedua*, kebijakan pendidikan nasional yang sangat sentralistik dan menekankan *uniformitas* (keseragaman) yang mengakibatkan beban kurikulum serba seragam dan *overloaded*; *Ketiga*, pendanaan yang masih belum memadai karena pemerintah belum menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dalam membangun Indonesia; *keempat*, akuntabilitas yang berkaitan dengan pengembangan dan pemeliharaan system dan kualitas pendidikan yang masih timpang; *kelima*, profesionalisme guru dan tenaga kependidikan yang masih belum memadai; *keenam*, relevansi yang masih timpang dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.

Dalam mengatasi permasalahan keterbatasan kesempatan mendapatkan pendidikan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan wajib belajar sembilan tahun yang memberikan kesempatan kepada semua warga negara Indonesia untuk mendapatkan layanan pendidikan mulai usia 7 tahun sampai dengan 15 tahun. Namun, kebijakan yang diluncurkan pada tanggal 2 Mei 1994 ini belum berjalan secara maksimal. Jalal dan Supriyadi (2001: 27) menunjukkan laporan tentang angka partisipasi murni (APM) tingkat SD pada tahun 1994/1995 sebesar 93,29 % dan meningkat menjadi 98,29% pada tahun 1998/1999. Adapun angka partisipasi kasar

(APK) SD sebesar 114,52%. Namun, keberhasilan APM di tingkat SD tidak sebesar pencapaian APK dan APM di tingkat SMP. Pada tahun 1998/1999 APK SMP sebesar 70,43%. Ini berarti bahwa masih terdapat kurang lebih 29,57% anak usia SMP yang tidak mendapatkan layanan pendidikan setingkat SMP, sedangkan APK SLTA lebih rendah lagi yaitu 66,8%. Meskipun demikian, rendahnya APK setingkat SLTA tidak terlalu menjadi perhatian utama karena pemerintah baru menetapkan wajib belajar sampai dengan 9 tahun (6 tahun SD dan 3 tahun SLTP). Apabila dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, APK tingkat SLTP di Indonesia tergolong rendah. Menurut Djalal (Solopos, 23 Oktober 2007), saat ini masih terdapat 1,5 juta anak Indonesia yang belum mendapatkan tempat untuk wajib belajar sembilan tahun. Di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2006/2007 angka partisipasi kasar SD sebesar 115,88% dan angka partisipasi murni sebesar 99,12%. Adapun angka partisipasi kasar SMP sebesar 86,39% dan angka partisipasi murni sebesar 66,33%. Belum tercapainya angka 100% tingkat partisipasi penduduk dalam mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar setingkat SMP mengakibatkan masih terdapat kurang lebih 13,61% anak yang tidak tertampung dalam pendidikan formal yang meliputi berbagai usia. Anak usia 13 - 15 tahun yang tidak mengikuti pendidikan setingkat SMP mencapai 33,70%. Oleh karena itu, pemerintah mendorong berbagai pihak, termasuk jalur pendidikan nonformal, untuk berperan dalam menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun.

Pada jalur Pendidikan Nonformal, program penyelesaian wajib belajar sembilan tahun diselenggarakan melalui Program Paket A (setara SD/MI) dan Program Paket B

(Setara SMP/MTs). Program ini ditujukan kepada warga masyarakat yang karena berbagai faktor tidak dapat mengikuti program pendidikan di sekolah formal.

Berkaitan dengan mutu, wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang diberlakukan di Indonesia hendaknya mampu menjawab jenis pendidikan yang diperlukan untuk masa depan. Delors, sebagaimana dikutip oleh Sa'ud dan Sumantri (2007: 115) memandang bahwa pendidikan dasar masa depan merupakan sebuah paspor untuk hidup, yang sangat diperlukan oleh setiap individu untuk hidup dan mampu memilih apa yang mereka lakukan, mengambil bagian dalam pembangunan masyarakat masa depan secara kolektif, dan terus menerus belajar. Dengan demikian pendidikan dasar hendaknya mampu memberikan bekal bagi warga belajar untuk hidup di masa yang akan datang. Lebih jauh Sa'ud dan Sumantri (2007: 1120) menjelaskan bahwa pendidikan dasar sebenarnya memiliki fungsi pokok yang luas dan komprehensif, yang tidak hanya dipergunakan untuk masyarakat, tetapi hendaknya tertuju pada suatu kajian tentang praktik dan kebijakan pendidikan dasar yang memberikan suatu landasan yang mantap bagi praktik belajar warga belajar di masa depan, dan sekaligus mengembangkan ketrampilan hidup (*life skills*) yang esensial untuk sebuah kehidupan yang konstruktif dalam masyarakat. Dari pendapat tersebut dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu memberikan bekal bagi warga belajar untuk mampu hidup di masyarakat yang akan datang.

Permasalahan pendidikan yang lain erat kaitannya dengan kebijakan pendidikan yang selama ini lebih banyak bersifat sentralistik. Dalam mengatasi permasalahan tersebut

pemerintah telah mengeluarkan kebijakan desentralisasi dalam penyusunan kurikulum, yaitu dengan diberlakukannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. “dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi sekolah/daerah, karakteristik sekolah/daerah, sosial budaya masyarakat setempat dan karakteristik warga belajar” (Mulyasa, 2006: 8). Dengan adanya kebijakan ini besar kemungkinan ditemukan perbedaan kurikulum antar sekolah. Satu-satunya yang menjadi acuan penyusunan kurikulum adalah adanya standar kompetensi yang tetap dirumuskan secara sentralistik sebagai barometer kualitas pendidikan di Indonesia. Pelaksanaan KTSP yang relatif baru, banyak menimbulkan permasalahan di lapangan. Hal ini disebabkan selama ini kurikulum disusun secara sentralistik dan pelaksana lapangan tinggal melaksanakan berbagai ketentuan yang tercantum dalam kurikulum yang telah disediakan. Akibatnya ketika pelaksana lapangan diberi kewenangan untuk menyusun kurikulum sendiri, banyak kesulitan yang dihadapi. Oleh karena itu, diperlukan model implementasi kurikulum yang sesuai dengan kondisi di mana pendidikan tersebut berlangsung. Kondisi ini merujuk karakteristik tujuan pelajaran yang akan dicapai, karakteristik materi pelajaran yang dipelajari, karakteristik warga belajar, karakteristik guru, karakteristik lingkungan, ketersediaan sarana, prasarana, media belajar, serta berbagai kondisi pendukung lainnya.

Permasalahan pendidikan lain seringkali muncul karena keterbatasan dana pendidikan. Oleh karena itu, Undang-undang Dasar telah mengamanatkan untuk menyediakan 20% dari total anggaran baik dari APBN maupun APBD untuk

kepentingan pendidikan. Namun, keterbatasan sumber dana yang ada dan besarnya beban pembangunan menjadikan pemerintah belum mampu memenuhi ketentuan pembiayaan pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang. Akibat keterbatasan dana ini, banyak komponen-komponen pendidikan yang tidak mendapatkan alokasi dana yang semestinya. Akibat lebih lanjut adalah proses pendidikan yang tidak dapat dilakukan secara maksimal sehingga menjadikan mutu pendidikan yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Meskipun menurut penilaian UNESCO yang disampaikan pada Sidang Umum ke-34, posisi kualitas pendidikan Indonesia di Badan PBB termasuk golongan menengah keatas, bangsa Indonesia masih dihadapkan pada persoalan relevansi pendidikan. Hal itu antara lain ditunjukkan dengan adanya lulusan yang tidak mampu terserap dalam dunia kerja atau menjadi tenaga kerja mandiri dapat dilihat melalui jumlah penganggur, yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Jumlah Penganggur menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2005

No	Bidang Pendidikan	Tingkat Pengangguran
1	Tidak lulus SD	1.012.711
2	SD	2.540.977
3	SMP	2.680.810
4	SMA	3.911.502
5	DI / DIII	107.516
6	DIII / Akademi	215.320
7	Universitas	385.418

Sumber : BPS (dalam Kunandar, 2007 : 3)

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penganggur tertinggi adalah penduduk yang memiliki pendidikan SMA ke bawah. Data ini merupakan

data yang wajar karena lulusan SMA ke bawah adalah mereka yang mendapatkan pendidikan dasar yang bersifat umum sehingga mereka tidak memiliki bekal keterampilan untuk bekerja.

Adapun jumlah pencari kerja menurut tingkat pendidikan, pada tahun 2005 adalah sebagai berikut.

Tabel 1.2
Jumlah Pencari Kerja menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2005

No.	Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	Tidak sekolah	278.329	3,5
2	Tidak/belum tamat SD	573.097	7,2
3	Tamat SD	1.893.565	23,7
4	Tamat SMP Umum	1.786.317	22,3
5	Tamat SMA Umum	1.881.578	23,5
6	Tamat SMK	1.051.912	13,1
7	Tamat Akademi/Diploma	289.134	3,1
8	Tamat Universitas	289.099	3,6

Sumber : BPS(dalam Kunandar, 2007: 3)

Data tersebut juga menunjukkan bahwa lulusan SD, SMP, dan SMA merupakan pencari kerja yang memiliki persentase tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan mereka untuk bekerja pada pihak lain sangat tinggi sehingga kurang mampu menciptakan lapangan kerja secara mandiri.

Pada kondisi angkatan kerja umum, Suyanto (2006: 62) melaporkan hasil studi Budiono di tahun 1997, yang menunjukkan bahwa angkatan kerja di Indonesia, 53 % tidak berpendidikan, hanya 34 % yang mencapai pendidikan dasar, berpendidikan menengah 11 % dan yang berpendidikan tinggi hanya 2 %. Studi Depdiknas Tahun 2006 menunjukkan bahwa terdapat 25,60 % penganggur di Indonesia yang memiliki

pendidikan tamat SMP dan 24,09 % tamat SD. Angka tersebut menunjukkan indikator rendahnya mutu sumber daya manusia yang berakibat pada kecilnya tingkat penyerapan tenaga kerja. Kondisi semacam itu dapat diduga bahwa pendidikan yang selama ini diperoleh melalui sekolah kurang mampu memberikan bekal yang cukup bagi lulusannya untuk bekerja di masyarakat baik secara mandiri maupun bekerja pada orang lain/instansi. Ada berbagai faktor yang menyebabkan mengapa lulusan sekolah kurang dapat terserap dalam dunia kerja, salah satunya adalah kurikulum. Kurikulum yang berfungsi sebagai pedoman bagi lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan proses pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam mempersiapkan lulusan yang akan dihasilkan. Selama ini kurikulum di Indonesia dinilai sarat akan muatan pembelajaran. Beratnya beban kurikulum yang harus dilaksanakan oleh guru, mengakibatkan orientasi pembelajaran lebih banyak menyentuh aspek kognitif saja. Keterbatasan waktu dan banyaknya beban kurikulum mengakibatkan siswa hanya dipersiapkan untuk menyelesaikan seluruh beban kurikulum saja. Kurangnya kesempatan peserta didik (selanjutnya akan disebut dengan warga belajar, sebutan yang lazim digunakan dalam pendidikan nonformal untuk menunjuk pada warga belajar) untuk mencerna lebih lanjut dengan menghubungkan dengan fenomena di lapangan melalui kegiatan keterampilan atau praktik, menjadikan para lulusan menjadi gamang ketika terjun ke masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan model pembelajaran yang mampu menghubungkan antara teori yang dipelajari di sekolah dan kebutuhan dunia kerja sehingga para lulusan dapat

menerapkan ilmu yang dipelajarinya di berbagai sektor pekerjaan, termasuk bekerja secara mandiri.

Namun, merumuskan model pembelajaran yang mampu menghubungkan antara teori dan praktik di lapangan bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah. Kurikulum yang terlalu ketat akan mempengaruhi keleluasaan tutor untuk melaksanakan kurikulum tersebut dalam praktik pembelajaran. Dalam pendidikan kurikulum merupakan unsur yang sangat penting dalam setiap jenis dan model pendidikan. Para ahli memandang kurikulum dari sudut pandang yang berbeda-beda Beane (1994 : 28 - 32) membagi kurikulum ke dalam empat jenis yaitu (1) kurikulum sebagai produk, (2) kurikulum sebagai program, (3) kurikulum sebagai hasil belajar yang diinginkan, dan (4) kurikulum sebagai pengalaman belajar. Cara pandang terhadap kurikulum akan sangat berpengaruh terhadap model pembelajaran dan hasil pendidikan. Kurikulum yang baik disertai dengan praktik pembelajaran yang baik pula akan memiliki kontribusi yang besar dalam menghasilkan lulusan yang bermutu.

Kita menyadari bahwa kurikulum memiliki peran besar dalam menghasilkan lulusan yang bermutu. Oleh karena itu, pembaharuan kurikulum merupakan suatu tindakan yang tepat, agar kurikulum yang disusun mampu memenuhi berbagai kebutuhan zaman. Pelaksanaan kurikulum yang telah disusun di suatu negara dapat dilihat melalui praktik pembelajaran di berbagai jenjang dan jalur pendidikan. Selama ini ada anggapan bahwa berbagai persoalan yang muncul dalam bidang pendidikan diakibatkan oleh penyusunan kurikulum yang kurang tepat. KTSP yang merupakan jawaban terhadap persoalan kebijakan penyusunan kurikulum, bukan merupakan

satu-satunya jawaban yang serta merta dapat mengatasi persoalan pendidikan. Hal ini dapat dipahami karena permasalahan kurikulum bukan hanya sekadar persoalan siapa yang menyusun kurikulum, melainkan lebih pada bagaimana isi kurikulum dan bagaimana kurikulum tersebut dilaksanakan.

Dalam hal isi kurikulum pemerintah Indonesia telah menetapkan standar isi kurikulum di berbagai jenis, jenjang, dan jalur pendidikan melalui Keputusan Menteri No. 23 Tahun 2006 (Tim Pustaka Yustisia, 2007: 45). Standar isi ini dirumuskan sebagai pedoman bagi para pengembang kurikulum dan tutor di setiap satuan pendidikan dalam menjabarkan materi pelajaran yang akan digunakan sebagai bahan untuk mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Standar Kompetensi Lulusan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2006 menjabarkan kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta setelah mengikuti jenjang pendidikan tertentu, yang kemudian dijabarkan dalam standar kompetensi kelompok mata pelajaran dan standar kompetensi mata pelajaran, pada Satuan Pendidikan Dasar (SD/MI/SDLB/Paket A dan SMP/MTs/SMPLB/Paket B). Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan dikembangkan berdasarkan tujuan pendidikan yang akan dicapai, yaitu meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lanjut (Tim Pustaka Yustisia, 2007: 86). Jika mencermati rumusan tujuan tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa pendidikan dasar memiliki fungsi baik untuk memperoleh dasar pengetahuan, kecerdasan, kepribadian, akhlak

mulia dan keterampilan yang akan digunakan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun untuk bekerja secara mandiri.

Apabila dilihat angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar, khususnya di tingkat SLTP dan SLTA, lulusan setingkat SD yang melanjutkan ke jenjang pendidikan SLTP dan lulusan SLTP yang melanjutkan ke SLTA, belum mencapai 100%. Hal ini berarti bahwa mereka yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi akan kembali ke masyarakat dengan segala bekal kemampuan yang dimilikinya ketika menuntut ilmu di sekolah sebelumnya. Kondisi ini menimbulkan pemikiran jika sekolah tidak menyiapkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kerja kepada siswa, maka mereka yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, besar kemungkinan akan menjadi penganggur tanpa keterampilan. Oleh karena itu, kurikulum dan pembelajaran harus mengembalikan praktik pendidikan pada tujuan semula diselenggarakan satuan pendidikan tersebut

Salah satu program sebagai jawaban atas permasalahan di atas adalah dengan dikembangkan pendidikan yang menggunakan pendekatan *Broad Based Education* (BBE) yang kemudian banyak dijabarkan dalam Pendidikan Kecakapan Hidup (*life skill*). Pada jalur pendidikan nonformal, pentingnya Pendidikan Kecakapan Hidup ini secara eksplisit dicantumkan dalam Standar Kompetensi Lulusan Paket B pada jalur pendidikan non formal, yaitu memiliki keterampilan untuk memenuhi tuntutan dunia kerja (Diktara, 2006: 17). Rumusan tujuan dan standar kompetensi lulusan bagi warga belajar Program Paket B, mengisyaratkan bahwa minimal ada dua aspek yang dikembangkan dalam program paket B, yaitu aspek akademik dan aspek kecakapan

hidup (*life skill*). Aspek akademik berkaitan dengan kemampuan warga belajar yang meliputi ranah kognitif, afektif dan psikomotorik (Bloom dalam Yulaelawati, 2004: 59). Adapun aspek kecakapan hidup (*life skills*) mencakup berbagai macam. Sukmadinata (2004: 28) yang mengartikan kecakapan hidup sebagai sebuah kompetensi, menyebutkan minimal ada lima kompetensi yang termasuk dalam kecakapan hidup, yaitu kompetensi dasar, kompetensi umum, kompetensi akademik, kompetensi vokasional dan kompetensi profesional. Adapun Triyadi (2006) menyebutkan bahwa ada empat jenis kecakapan hidup yaitu kecakapan personal (*personal skills*), kecakapan social (*social skills*), kecakapan akademik (*academic skills*), dan kecakapan vokasional (*vocational skills*). Kecakapan hidup ini penting diberikan agar dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia.

Apabila mencermati uraian di atas, dapatlah diketahui bahwa konsep tentang kecakapan hidup sebenarnya sangat luas dan menyangkut berbagai aspek. Namun, di lapangan terjadi banyak pemahaman yang sempit. Kecakapan hidup sering hanya diartikan sebagai keterampilan atau ketrampilan kerja saja. Hal ini dapat diketahui dari hasil survey kepada 18 lembaga penyelenggara Program Paket B. Sejumlah tujuh belas lembaga penyelenggara menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan kecakapan hidup adalah memberikan keterampilan kepada warga belajar seperti menjahit, mempelajari komputer, membuat aneka makanan dan membuat kompos. Adapun satu lembaga lain memberikan pengertian pendidikan kecakapan hidup dengan memberikan program tentang cara praktis berwiraswasta dan pengembangan motivasi diri. Apa yang ditunjukkan hasil survei tersebut mencerminkan adanya

pemahaman yang sempit terhadap arti kecakapan hidup sehingga ketika kita membicarakan kecakapan hidup orang akan mengasosiasikan dengan berbagai jenis keterampilan kerja atau kursus keterampilan, seperti menjahit, belajar komputer, belajar elektro dan bertani.. Sangat jarang mereka memiliki pemahaman yang utuh bahwa pendidikan kecakapan hidup juga menyangkut aspek kepribadian, social, dan akademik. Pemahaman yang sempit terhadap pengertian kecakapan ini, menjadikan pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup menemui banyak kesulitan karena satuan pendidikan merasa kurang memiliki daya dukung yang memadai untuk melaksanakan kegiatan praktik keterampilan. Sempitnya pemahaman ini mengakibatkan aspek kepribadian dan sosial kurang mendapatkan perhatian, yang sebenarnya dapat diintegrasikan dengan mata pelajaran lainnya. Apa yang terjadi di lapangan tentang pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup yang kurang maksimal, tidak lepas dari peran berbagai institusi yang membidangi program pendidikan nonformal. Pada tataran program, pelaksanaan program pendidikan nonformal yang tertuang dalam bentuk program-program kecakapan hidup tidak lepas dari kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah (sekarang Dirjen PNFI) yang membuat skema pelaksanaan program pendidikan kecakapan hidup. Selain itu, keterbatasan tutor untuk mengaitkan mata pelajaran yang diampunya dengan pendidikan kecakapan hidup, tidak lepas dari peran Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, khususnya Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal, yang selama ini belum pernah mengadakan pelatihan bagi tutor mata pelajaran tentang pentingnya pendidikan kecakapan hidup bagi warga

belajar. Selain itu, keterbatasan Dinas Pendidikan di Tingkat Kabupaten selaku dinas yang membidangi teknis penyelenggaraan program pendidikan kecakapan hidup, tidak cukup memiliki daya dukung untuk melakukan pembinaan kepada penyelenggara program pendidikan kecakapan hidup. Terbatasnya pengembangan model pembelajaran, sosialisasi dan uji coba model yang seharusnya dilakukan oleh unit pelaksana teknis yang membidangi pendidikan nonformal, seperti BPPNFI dan SKB, turut memberikan kontribusi terhadap kurangnya pelaksanaan program pendidikan kecakapan hidup di berbagai kelompok belajar. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menemukan model pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengaplikasikan kurikulum pendidikan kecakapan hidup ke dalam praktik pendidikan sehari-hari.

Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP), dalam proses pembelajaran, pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup ini dapat merupakan bagian integral dari pendidikan semua mata pelajaran dan / atau berupa paket / modul yang direncanakan secara khusus. Bahkan, Susilana (2006: 75) secara tegas menyatakan bahwa pendidikan yang berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup merupakan bagian dalam pengembangan kurikulum terpadu karena pengembangan kecakapan hidup seharusnya tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan disiplin ilmu atau mata pelajaran yang lain. Selanjutnya, Susilana juga menyampaikan bahwa supaya tidak menjadi dangkal, substansi pengembangan kecakapan hidup harus terpadu dengan struktur kurikulum di sekolah tersebut sehingga bukan sekadar pendidikan keterampilan atau vokasional dasar yang terpisah-pisah. Kurikulum

integrasi (*integrated curriculum*) merupakan salah satu pendekatan kurikulum yang mampu mengakomodasi pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup yang diintegrasikan dengan mata pelajaran. Menurut Drake (2004: 6), secara ringkas dapat dikatakan bahwa *integrated curriculum* adalah bagaimana membuat sebuah hubungan, baik hubungan antarmata pelajaran, hubungan dengan kehidupan maupun hubungan antarketerampilan dan pengetahuan, dan sebagainya. Adapun menurut Beane (1997: 2), *curriculum integration* adalah suatu desain kurikulum yang mencari seluruh hubungan secara langsung antara berbagai hal baik dengan masyarakat, antara subjek, dan sebagainya. Kurikulum terpadu memfokuskan pada mata pelajaran. Proses pembelajaran yang menggunakan kurikulum terpadu dilakukan secara keseluruhan (*holistic*), yakni warga belajar ditempatkan dalam posisi sentral. Warga belajar belajar secara aktif, terutama dalam pengembangan keterampilan berpikirnya. Dalam kurikulum terpadu digunakan mata pelajaran terpadu sehingga terdapat keterpaduan antarmata pelajaran dan diajarkan oleh suatu tim (Johnson, 2006: 118). Mata pelajaran terpadu sesuai dengan kebutuhan warga belajar untuk menyusun pola dalam menemukan makna. Menurut Beane (1997: 4) *curriculum integration* memiliki empat aspek utama, yaitu integrasi pengalaman, integrasi sosial, integrasi pengetahuan, dan integrasi sebagai desain kurikulum. Sebagaimana diuraikan di atas, integrasi pendidikan kecakapan hidup yang meliputi kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan akademik, dan kecakapan vokasional memungkinkan untuk dilaksanakan dengan berbagai mata pelajaran yang ada. Meskipun demikian, tutor harus dapat memilih mata pelajaran atau topik apa yang relevan untuk memasukan

nilai-nilai kecakapan hidup ke dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat dimengerti karena setiap mata pelajaran dan topik pelajaran memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

Salah satu mata pelajaran yang memungkinkan diintegrasikannya pendidikan kecakapan hidup ke dalam mata pelajaran adalah mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Menurut Gross (dalam Muchtar, 2007: 831), pendidikan IPS bertujuan untuk “*to prepare student to be well functioning citizens in democratic sociality*”. Mata pelajaran IPS bertujuan untuk menyiapkan warga belajar agar dapat berfungsi sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat yang demokratis. Selanjutnya, Mochtar (2007: 831) juga menyebutkan bahwa tujuan lain mata pelajaran IPS adalah untuk “mengembangkan kemampuan menggunakan penalaran dalam pengambilan keputusan setiap persoalan yang dihadapinya. IPS juga dapat mengembangkan kemampuan berpikir karena berpikir merupakan potensi manusia yang perlu secara sengaja dikembangkan untuk mencapai kapasitas yang optimal”. Dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran IPS dan tuntutan kecakapan hidup yang harus dimiliki warga belajar, kedua bidang tersebut memungkinkan untuk dilaksanakan pembelajaran secara integratif.

Berbagai model pembelajaran dapat dipilih untuk menerapkan pembelajaran yang dapat mengintegrasikan pembelajaran IPS dan kecakapan hidup. Penerapan kurikulum terpadu dapat dilakukan dengan menggunakan strategi pembelajaran yang relevan.

Dengan melihat kebutuhan warga belajar dan tuntutan penguasaan aspek akademik serta kecakapan hidup yang harus dikuasai, dapat dikatakan bahwa tuntutan pembelajaran tersebut sangat komprehensif, karena bukan hanya menyangkut aspek akademis, melainkan juga aspek kecakapan hidup. Tuntutan tersebut dapat dipenuhi melalui proses pembelajaran yang relevan. Anwar (2004: 27) menyatakan bahwa pendidikan kecakapan hidup sepatutnya dilaksanakan sesuai dengan kondisi lingkungan alam dan lingkungan sosial budaya yang ada. Kondisi ini mengisyaratkan pembelajaran yang sesuai dengan konsteks yang ada. Menurut Sukmadinata (2004: 167) kondisi ini akan dapat dipenuhi dengan penerapan pembelajaran kontekstual (*contextual teaching and learning*). Menurut Sanjaya (2006: 253) *contextual teaching and learning* adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka.

Dari berbagai uraian di atas, dipandang perlu untuk mengadakan pembaharuan terhadap proses pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial yang diintegrasikan dengan pendidikan kecakapan hidup, melalui penerapan model pembelajaran untuk meningkatkan kecakapan hidup warga belajar Program Paket B.

B. RUMUSAN MASALAH DAN PERTANYAAN PENELITIAN

Secara ideal Program Paket B hendaknya dapat memenuhi tuntutan warga belajar baik yang menyangkut pemenuhan aspek akademik maupun aspek kecakapan hidup.

Penguasaan akademik diperlukan oleh warga belajar dalam upaya mendapatkan haknya tentang pendidikan dasar dan bekal untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua warga belajar akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sebagian besar dari mereka akan kembali ke masyarakat. Lulusan Program Paket B yang tidak mendapatkan bekal kecakapan hidup ketika mengikuti program pembelajaran, mereka tidak akan memiliki bekal untuk membuka usaha baru dan bekerja di masyarakat sesuai dengan kompetensinya. Dengan kurangnya kompetensi ini mengakibatkan lulusan Program Paket B akan bekerja di sektor-sektor informal yang relatif tidak memerlukan kemampuan akademik dan kecakapan hidup yang tinggi.

Berdasarkan standar kompetensi lulusan yang menjadi tuntutan yang harus dipenuhi oleh program Program Paket B serta tuntutan kebutuhan warga belajar untuk mendapatkan bekal kecakapan untuk terjun ke masyarakat bagi yang tidak mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, program pembelajaran Program Paket B harus mampu melakukan modifikasi terhadap proses pembelajaran yang selama ini dilakukan agar dapat mendapatkan berbagai tuntutan tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membuat model pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan akademik dan kebutuhan kecakapan hidup. Kebutuhan akademik diperoleh warga belajar melalui berbagai mata pelajaran wajib selama mengikuti pendidikan, sedangkan kebutuhan kecakapan hidup dapat dibuat dalam program yang terpisah dan dapat diintegrasikan dengan mata pelajaran.

Penyelenggara pendidikan nonformal yang menyelenggarakan Program Paket B, yang selama ini memiliki fasilitas yang kurang apabila dibandingkan penyelenggara pendidikan formal, tidak selalu mampu melakukan penerapan pendidikan kecakapan hidup secara mandiri / terpisah dengan mata pelajaran. Oleh karena itu perlu dicari alternatif untuk menyelenggarakan pendidikan kecakapan hidup yang terintegrasi dengan mata pelajaran lainnya. Meskipun demikian, memadukan seluruh mata pelajaran dengan pendidikan kecakapan hidup bukan merupakan hal yang mudah. Dari berbagai kajian terhadap penelitian yang pernah dilakukan, belum pernah ada sebuah penelitian yang mengkaji tentang model pembelajaran pendidikan kecakapan hidup yang terintegrasi dengan mata pelajaran. Hal ini dapat dipahami karena penerapan pendidikan kecakapan hidup yang terintegrasi dengan mata pelajaran, minimal akan mengubah pola pikir tutor yang selama ini telah secara konvensional melaksanakan proses pembelajaran dalam mata pelajarannya masing-masing. Oleh karena itu sebagai salah satu upaya mengenalkan pentingnya integrasi pendidikan kecakapan hidup dengan mata pelajaran, perlu dilakukan uji coba dengan memilih mata pelajaran dan topik yang relevan.

Mata pelajaran IPS, yang selama ini dipersepsi oleh masyarakat umum sebagai mata pelajaran hapalan, memiliki peluang untuk melaksanakan proses pembelajaran yang terintegrasi dengan kecakapan hidup, karena salah satu kajian mata pelajaran IPS adalah mengkaji berbagai masalah sosial yang erat kaitannya dengan praktik kehidupan warga belajar. Dengan integrasi ini diharapkan akan mampu meningkatkan kecakapan hidup warga belajar dengan tidak mengabaikan pencapaian kecakapan

akademik yang menjadi tuntutan mata pelajaran tersebut. Selain itu, juga diharapkan akan mampu mengembalikan fungsi mata pelajaran IPS pada tujuan semula, yaitu menyiapkan warga belajar agar mampu mengatasi berbagai permasalahan dalam kehidupan di masyarakat yang akan datang.

Meskipun demikian, tidaklah mudah untuk melakukan modifikasi terhadap proses pembelajaran yang selama ini dilakukan agar dapat menyediakan kondisi sehingga kecakapan hidup dapat dipelajari. Banyak faktor yang harus diperhatikan agar sebuah proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Apabila menggunakan cara pandang sistem, proses pembelajaran hanya akan dapat berjalan dengan baik apabila ada keterpaduan yang penuh antara komponen input, yaitu warga belajar dan komponen proses baik yang menyangkut instrumental maupun lingkungan yang mendukung untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diterapkan. Menurut Sanjaya (2006: 47), sistem adalah “satu kesatuan komponen yang satu sama lain saling berinteraksi untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan”. Dalam pengertian di atas, terdapat tiga karakteristik utama sebuah sistem, yaitu pertama sistem pasti mengandung sebuah tujuan, kedua sistem selalu mendukung proses, dan ketiga dalam proses tersebut melibatkan berbagai komponen. Beberapa komponen atau faktor yang terdapat dalam sistem pembelajaran dikelompokkan dalam komponen *input*, *process*, dan *output* (Sukmadinata, 2003: 9).

Selain itu, dalam proses pembelajaran, terjadinya hambatan-hambatan selama proses pembelajaran sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, tindakan antisipatif

untuk mengatasi kemungkinan terjadinya hambatan dan tindakan taktis untuk mengatasi hambatan tersebut sangat diperlukan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan dengan mengacu pada masalah yang berkenaan dengan implementasi model pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yang diintegrasikan dengan Pendidikan Kecakapan Hidup sehingga mampu meningkatkan kecakapan hidup warga belajar Program Paket B. Masalah tersebut dirumuskan dalam pertanyaan pokok yaitu *“model pembelajaran yang bagaimana yang mampu meningkatkan kecakapan hidup warga belajar?”*

Pertanyaan pokok tersebut selanjutnya dibjabarkan dalam beberapa pertanyaan penelitian yang lebih yaitu sebagai berikut.

- a. Bagaimanakah kondisi model pembelajaran Pendidikan Kecakapan Hidup saat ini?
- b. Bagaimanakah desain model pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan kecakapan hidup?
- c. Bagaimanakah implementasi model pembelajaran kecakapan hidup termasuk evaluasinya?
- d. Bagaimanakah efektivitas model pembelajaran yang dapat meningkatkan kecakapan hidup baik secara internal maupun eksternal?
- e. Bagaimanakah kekuatan dan kelemahan model pembelajaran kecakapan hidup yang dikembangkan?
- f. Faktor-faktor pendukung apa yang diperlukan untuk pelaksanaan pembelajaran pendidikan kecakapan hidup yang dikembangkan?

C. DEFINISI OPERASIONAL

Ada dua variabel yang menjadi inti kajian dalam penelitian ini, yaitu model pembelajaran dan kecakapan hidup. Untuk mendapatkan pemahaman konsep yang sama mengenai berbagai istilah dalam berbagai variabel tersebut didefinisikan sebagai berikut:

1. Model pembelajaran

Model pembelajaran memiliki berbagai pengertian. Salah satu pengertian tentang model pembelajaran dikemukakan oleh Sukmadinata (2004: 209). Dia mengemukakan bahwa model pembelajaran sebagai “suatu desain yang menggambarkan suatu proses, rincian dan penciptaan lingkungan belajar yang memungkinkan siswa/mahasiswa berinteraksi sehingga terjadi perubahan atau perkembangan pada diri siswa/mahasiswa”. Desain tersebut akan mencakup berbagai komponen dan langkah-langkah yang akan dilakukan selama proses pembelajaran sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan warga belajar berkembang secara optimal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Joice, Weil, dan Calhoun (2000: 13) memandang bahwa model pembelajaran (pengajaran) yang dikaitkan dengan lingkungan belajar menggambarkan mengenai “*ranging from planning curriculums, courses, unit, and lesson designing instructional, materials, book and work books, multimedia, programs and computer assisted learning proses*”.

Dari berbagai rumusan tentang model pembelajaran tersebut, yang dimaksud dengan model pembelajaran dalam penelitian ini adalah suatu **pola atau desain yang berisi**

tentang konsep dan langkah-langkah pembelajaran yang disusun secara sistematis yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran pada diri warga belajar dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Langkah model tersebut akan disusun berdasarkan teori yang terkait yang pengembangan model ini maupun hasil studi lapangan tentang pelaksanaan pembelajaran yang selama ini digunakan.

2. Kecakapan Hidup

Pengertian mengenai kecakapan hidup telah banyak dikembangkan oleh para ahli. Salah satu pengertian dikemukakan oleh Ali (2007: 1265). Dia menyatakan bahwa kecakapan hidup adalah “kecakapan untuk melakukan adaptasi dan perilaku positif yang memungkinkan individu untuk melakukan reaksi secara efektif dalam menghadapi kebutuhan dan tantangan sehari-hari”. ICAP (2005) *Life Skills* [Online] Tersedia:<http://www.icap.org/portals/o/download/all/pdf/blue.book/modularoz.Lifeskill.pdf>. [8 Maret 2007] mengemukakan definisi *life skills* yang dirumuskan oleh WHO. Menurut WHO, *life skills* didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan adaptasi dan tingkah laku positif yang memungkinkan seorang individu untuk berhubungan secara efektif dengan harapan dan tantangan hidup sehari-hari. Anwar (2004: 21) menjelaskan bahwa pada dasarnya *life skill* membantu warga belajar dalam mengembangkan kemampuan belajar (*learning how to learn*), menghilangkan kebiasaan dan pola pikir yang tidak tepat (*learning how to unlearn*), menyadari dan mensyukuri potensi diri untuk dikembangkan dan diamankan, berani menghadapi problema kehidupan dan memecahkan secara kreatif. Dari berbagai pendapat tentang

kecakapan hidup sebagaimana diuraikan di atas, yang dimaksud dengan kecakapan hidup dalam penelitian ini adalah **kemampuan warga belajar untuk melakukan adaptasi sikap dan perilaku yang memungkinkan untuk mengatasi berbagai permasalahan kehidupan sehari-hari, baik yang berkaitan dengan persoalan pribadi, persoalan sosial, persoalan akademik, maupun persoalan kerja.**

3. Program Paket B

Pendidikan nasional di Indonesia dilaksanakan melalui tiga jalur, yaitu jalur pendidikan formal, jalur pendidikan nonformal dan jalur pendidikan informal. Jalur pendidikan formal dan nonformal memiliki jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Pada jalur pendidikan nonformal dikenal berbagai jenis pendidikan, yaitu pendidikan anak usia dini, pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan berkelanjutan. Di antara berbagai jenis pendidikan pada jalur pendidikan nonformal, ada yang diselenggarakan secara berjenjang dan ada yang tidak berjenjang. Salah satu jenis satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan secara berjenjang adalah pendidikan kesetaraan, yang terdiri atas Program Paket A (setara SD/MI), Program Paket B (setara SMP/MTs), dan Program Paket C (setara SMA/MA). Program pendidikan nonformal, termasuk pendidikan kesetaraan, diperuntukan bagi warga masyarakat yang tidak mendapatkan layanan pada pendidikan formal atau karena sesuatu hal tidak mendapatkan layanan tentang apa yang dibutuhkan dalam pendidikan formal. Pendidikan nonformal dapat memberikan layanan kepada warga masyarakat tanpa adanya batasan usia yang ketat seperti pada pendidikan formal. Dengan uraian di atas, pengertian Program Paket B adalah **program pendidikan**

nonformal setara SMP/MTs yang diperuntukkan warga masyarakat yang tidak mendapatkan layanan pendidikan formal, baik untuk anak usia sekolah maupun usia dewasa.

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menghasilkan model pembelajaran IPS yang dapat meningkatkan kecakapan hidup warga belajar Program Paket B.

2. Tujuan Khusus

Berdasarkan tujuan umum tersebut, beberapa tujuan khusus penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

- a. mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan Pendidikan Kecakapan Hidup yang selama ini dilaksanakan;
- b. menemukan desain model pembelajaran untuk meningkatkan kecakapan hidup;
- c. mendapatkan gambaran tentang implementasi model pembelajaran yang dapat meningkatkan kecakapan hidup termasuk evaluasinya;
- d. mengetahui efektifitas model pembelajaran kecakapan hidup secara internal dan eksternal;
- e. mendapatkan gambaran tentang kekuatan dan kelemahan model pembelajaran kecakapan hidup yang dikembangkan;
- f. menemukan faktor-faktor pendukung untuk implementasi model pembelajaran kecakapan hidup yang dikembangkan.

E. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan suatu model pembelajaran yang mampu meningkatkan kecakapan hidup warga belajar melalui mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial yang dilaksanakan secara terpadu. Model pembelajaran ini akan dikembangkan berdasarkan landasan-landasan konseptual yang mendukung serta kenyataan empiris di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoretis

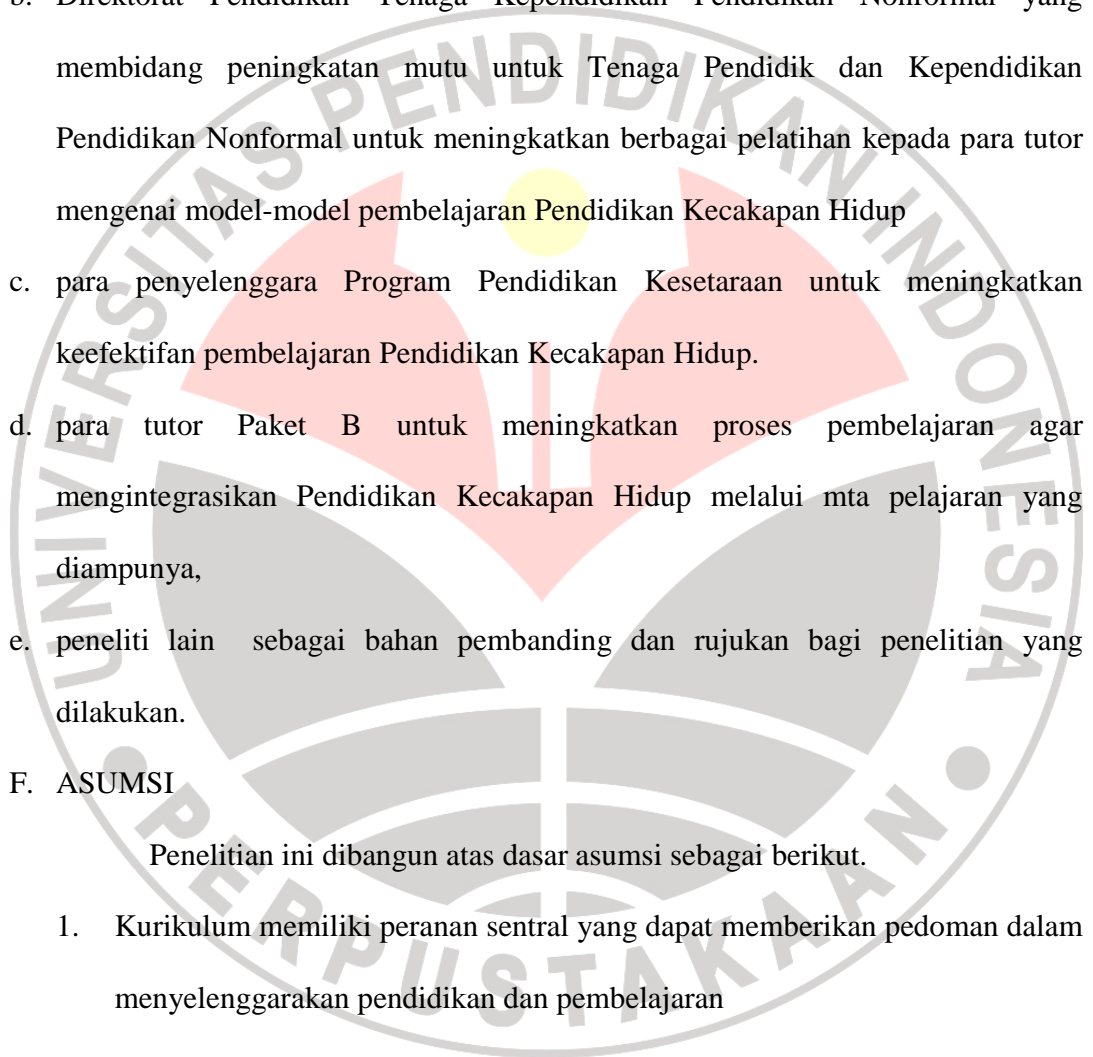
Penelitian pengembangan model pembelajaran ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam bidang pendidikan, terutama untuk:

- a. menemukan prinsip atau dalil mengenai model pembelajaran yang relevan bagi warga belajar dalam meningkatkan kemampuan kecakapan hidupnya yang meliputi kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan akademik, kecakapan vokasional, khususnya pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, dan.
- b. bidang pengembangan kurikulum sebagai konfirmasi model yang ada atau menambah pengembangan model pembelajaran yang telah ada.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dalam meningkatkan pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial.

Temuan-temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi berbagai pihak, antara lain:

- 
- a. Dinas Pendidikan, khususnya Subdinas Pendidikan yang membidangi Pendidikan Nonformal untuk didesiminasikan kepada satuan-satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan Program Pendidikan Kesetaraan,
 - b. Direktorat Pendidikan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal yang membidang peningkatan mutu untuk Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Nonformal untuk meningkatkan berbagai pelatihan kepada para tutor mengenai model-model pembelajaran Pendidikan Kecakapan Hidup
 - c. para penyelenggara Program Pendidikan Kesetaraan untuk meningkatkan keefektifan pembelajaran Pendidikan Kecakapan Hidup.
 - d. para tutor Paket B untuk meningkatkan proses pembelajaran agar mengintegrasikan Pendidikan Kecakapan Hidup melalui mata pelajaran yang diampunya,
 - e. peneliti lain sebagai bahan pembanding dan rujukan bagi penelitian yang dilakukan.

F. ASUMSI

Penelitian ini dibangun atas dasar asumsi sebagai berikut.

1. Kurikulum memiliki peranan sentral yang dapat memberikan pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran
2. Implementasi kurikulum memerlukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.
3. Proses pembelajaran dan hasil pembelajaran dipengaruhi oleh banyak faktor internal dan eksternal

4. Proses pembelajaran akan berpengaruh terhadap hasil belajar
5. Hasil pembelajaran kecakapan hidup warga belajar dapat diukur

G. HIPOTESIS PENELITIAN

Sesuai dengan masalah penelitian yang telah dikemukakan di atas maka selain akan mencoba menemukan jawaban atas berbagai pertanyaan yang diajukan, dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis yang akan diuji secara statistik. Hipotesis berkaitan dengan pertanyaan tentang keefektifan model pembelajaran dan kelebihan model pembelajaran yang dikembangkan apabila dibandingkan dengan pembelajaran yang biasa dilakukan. Adapun rumusan hipotesis tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Model pembelajaran kontekstual secara signifikan dapat meningkatkan kecakapan hidup warga belajar.
- b. Kecakapan hidup warga belajar dalam bentuk kecakapan pribadi, sosial, akademik, dan vokasional yang diperoleh dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual, lebih tinggi dibandingkan dengan yang diperoleh dari model pembelajaran yang biasa digunakan oleh tutor.

H. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode *research and development* (penelitian dan pengembangan). Secara garis besar metode penelitian ini akan mencakup tiga tahap, yaitu (1) studi pendahuluan yang meliputi studi pustaka dan studi lapangan untuk mendapatkan gambaran tentang model pembelajaran yang selama ini dilakukan (2) tahap pengembangan model yang

mencakup kegiatan penyusunan draf awal model yang disusun berdasarkan hasil kajian pustaka dan studi lapangan, uji coba terbatas, dan uji coba lebih luas untuk mendapatkan model hipotetik yang siap untuk divalidasi, dan (3) tahap pengujian yang dilakukan dengan mengimplementasikan model akhir yang telah disusun untuk mengetahui efektivitas model.

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan menggunakan berbagai macam teknik, yaitu pada saat studi awal dilakukan dengan wawancara, angket, dan studi dokumentasi. Pada tahap pengujian digunakan teknik angket, tes, dan observasi dan pada tahap validasi akan digunakan tes, angket, dan observasi.

Instrumen penelitian akan disusun berdasarkan kisi-kisi yang berdasarkan kajian teori yang dilakukan. Beberapa instrumen yang akan disusun antara lain pedoman wawancara dan angket untuk mendapatkan data pada saat melakukan studi pendahuluan. Pada tahap pengembangan dan tahap validasi digunakan instrumen tes, angket, dan pedoman observasi.

I. LOKASI DAN SAMPEL PENELITIAN

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kelompok Belajar Paket B di Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah yang memiliki 59 kelompok belajar. Lokasi ini dipilih karena memenuhi beberapa persyaratan untuk dilakukannya penelitian pengembangan dan secara teknis operasional dapat langsung dikendalikan oleh peneliti. Adapun yang akan digunakan sebagai sampel penelitian meliputi 28 kelompok belajar yang terbagi ke dalam beberapa kategori, yaitu studi pendahuluan

(18 kelompok), uji coba terbatas (1 kelompok), uji coba luas (3 kelompok), uji validasi (3 kelompok eksperimen dan 3 kelompok kontrol).

